

KEBANGKITAN USAHA DI MASA PANDEMI

Pelaku UKM Perlu Geluti Digital Marketing

YOGYA (KR) - Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Yogya mulai tahun ini digencarkan untuk menggeluti bidang digital marketing. Hal itu tidak sebatas melakukan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi melainkan memperkuat konten promosi.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Oleg Yohan, mengaku pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan mitra kerja di Pemkot untuk memberikan perhatian yang lebih pada aspek digital marketing.

“Dinas yang menjadi mitra kami seperti Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan serta Dinas Pariwisata sudah siap untuk menggulirkan. Kami

akan kawal,” tandasnya, Selasa (19/1).

Terdapat tiga aspek yang menjadi fokus digital marketing. Masing-masing visualisasi produk melalui video, narasi produk untuk konten promosi, dan pemasaran melalui website, media sosial maupun katalog. Ketiga aspek itu harus mampu dikuasai oleh pelaku UKM meski masih bersifat sederhana.

Oleg mengaku, langkah awal untuk memulai digital marketing ialah pemberian pelatihan bagi pelaku UKM. Terutama mengasah kemampuan dalam membuat konten video menggunakan telepon pintar. “Tidak perlu dengan kamera profesional. Tetapi cukup dengan handphone yang sudah dimiliki. Yang penting bisa mencari sudut pengambilan gambar kemudian mengeditnya. Kemampuan ini perlu dilatih,” imbuhnya.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting ialah membuat narasi yang mampu memperkuat video. Kemampuan membuat narasi sangat menentukan visualisasi produk agar

semakin dilirik serta diminati calon pembeli. Dicontohkannya, UKM yang menjual olahan ketela perlu digambarkan sejak pemilihan bahan bakunya. Kemudian pengolahan produk yang melibatkan kaum ibu terdampak pandemi juga perlu dinarasikan.

“Menarasikan proses dan siapa saja yang terlibat itu bisa menggugah pembeli. Bisa jadi orang yang sebelumnya tidak minat dengan ketela bisa tertarik membelinya sebagai sumbangsih untuk kebangkitan pelaku UKM di masa pandemi. Tentunya produk olahan tersebut harus terstandar dari aspek rasa, higienis dan pengemasan,” urainya.

Sementara untuk pemasaran, tidak semua pelaku UKM memiliki website. Sehingga perlu ada peran pemerintah untuk menjembatannya. Seperti membuatkan katalog secara berkelompok untuk diunggah ke website pemerintah maupun memfasilitasi aplikasi e-commerce atau disebarakan melalui berbagai Whatsapp Group.

Oleg mengaku, dirinya bahkan sudah membina beberapa pelaku UKM sebagai percontohan. Harapannya mereka kelak bisa memberikan semangat bagi pelaku lainnya agar tidak menyepelekan digital marketing sebagai peluang bangkit di masa pandemi. **(Dhi)-f**

FOKUS NORMALISASI SIMPANG DAN RTHP
Kegiatan Pengadaan Lahan Masih Terbatas

YOGYA (KR) - Sepanjang tahun 2021 kegiatan berupa pengadaan lahan yang dilakukan Pemkot Yogya masih terbatas. Tercatat hanya ada dua program yakni untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan normalisasi simpang.

Kepala Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana atau Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Wahyu Handoyo, menjelaskan pengadaan lahan untuk normalisasi simpang berada di wilayah Bugisan. “Di sana ada dua tahap yakni yang ke selatan dan ke barat. Tetapi baru satu tahap dulu yang akan kami bebaskan di tahun ini,” tandasnya, Selasa (19/1).

Dari satu tahap tersebut, terdapat beberapa petak yang harus dibebaskan. Simpang Bugisan yang mengarah ke selatan dinilai cukup sempit. Padahal jalan yang

berada di wilayah Bantul sudah memadai atau lebar. Sedangkan simpang Bugisan yang mengarah ke barat juga tergolong sempit dan perlu ada perluasan.

Sementara untuk lahan RTHP, ditentukan di wilayah Wirobrajan dengan luasan antara 300 hingga 400 meter persegi. Lahan untuk RTHP tersebut merupakan usulan dari wilayah dengan mempertimbangan skala prioritas. “Untuk RTHP sementara baru satu lahan. Kecuali nanti di perubahan anggaran kami juga siap jika ada belanja modal untuk pengadaan lahan. Seperti tahun 2020 lalu, saat perubahan anggaran ada delapan lahan yang bisa kami tuntaskan,” tandasnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogya Windarto, mengakui perlu ada normalisasi di simpang Bugisan.

Pihaknya pun hanya memberikan rekomendasi untuk kebutuhannya sedangkan setelah lahan terbebaskan, kewenangan normalisasi berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). “Kalau kami yang penting luasannya lebar supaya tidak ada gangguan,” katanya.

Kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan untuk kepentingan normalisasi simpang mencapai sekitar satu meter. Selama ini kendaraan yang terhenti di traffic light dengan kondisi jalan sempit selalu memunculkan persoalan lalu lintas. Terutama di simpang Bugisan yang mengarah ke selatan karena intensitas kendaraan dari selatan juga cukup tinggi. Sehingga begitu ada kendaraan dari arah berlawanan harus ekstra hati-hati. **(Dhi)-f**

APKLI DIY Minta Pemerintah
Perpanjang Jam Operasional Usaha



KR - Chaidir

Mochlas Madani (depan) memimpin diskusi PKL.

YOGYA (KR) - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta kepada pemerintah agar memperpanjang jam operasional usaha, jika kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) dilanjutkan.

“Jika selama PTKM (11-25 Januari) jam operasional usaha dibatasi sampai pukul 19.00, maka kami meminta diperpanjang hingga pukul 22.00 seandainya Pemda DIY melanjutkan PTKM,” kata Ketua DPW APKLI DIY Mochlas Madani usai pertemuan dengan pengurus DPD APKLI kabupaten/kota, Selasa (19/1).

Ia mengatakan, APKLI DIY dan kabupaten/kota sepakat akan tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan pemerintah. Namun demikian, kegiatan usaha tetap berjalan sebagai biasa. “Kami meminta kepada para anggota PKL seluruh DIY untuk mematuhi protokol kesehatan,” ujar Mochlas.

Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan masalah yang berat dihadapi berbagai pihak. Apalagi PKL yang selama ini hidupnya tergantung bantuan.

“Kalau ini terus berlangsung maka akan sangat berbahaya. Bisa mengubah mental jiwa PKL yang sebenarnya enterpreuneur atau berjiwa wirausaha,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu dihadiri Ketua DPD APKLI Bantul Eko Mahardi, Ketua DPD APKLI Sleman Prabowo, Ketua DPD APKLI Kota Yogyakarta Wawan Suhendra, dan Ketua Angkringan Malioboro Yati. Mochlas juga menyatakan bahwa APKLI meminta agar pemerintah tidak memperpanjang PTKM, karena memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian.

Sementara itu, Wawan Suhendra mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 para PKL telah kehilangan omzet yang sangat besar, terutama dari mahasiswa. Sejak diberlakukannya lockdown pada Maret 2020, Wawan memilih menutup usaha agar tidak terjadi kerugian.

Diakui bahwa selama ini kalangan mahasiswa yang ada di Yogya memberikan kontribusi yang besar bagi omzet PKL. “Perputaran uang dari mahasiswa di Yogya pertahun Rp 150 miliar. Sekarang ini Rp 0. Mahasiswa sangat membantu para PKL dalam perolehan omzet terbesar,” tambahnya. **(Cdr)-f**

NAIKKAN HARAPAN SEMBUH PASIEN COVID
PMI Kota Yogya Sediakan Alat Plasma Konvalesen

YOGYA (KR) - PMI Kota Yogya mengupayakan ketersediaan alat untuk melayani donor plasma konvalesen bagi penyintas Covid-19. Alat tersebut ditargetkan sudah dapat direalisasikan pada pekan ini.

Pimpinan PMI Kota Yogya Lilik Kurniawan, menjelaskan pengadaan alat untuk pengambilan plasma konvalesen dinilai mendesak di tengah lonjakan kasus Covid-19. “Ada harapan penyembuhan terhadap pasien melalui terapi plasma konvalesen dari penyintas atau pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Kami berupaya menaikkan harapan sembuh bagi pasien,” jelasnya, Selasa (19/1).

Alat berupa metode apheresis tersebut disesuaikan dengan standar baku dalam dunia kesehatan. Sembari menunggu ketersediaan

alat tersebut, PMI Kota Yogya juga sudah melakukan persiapan bagi pедonor. Nantinya PMI Kota Yogya merupakan satu-satunya PMI di DIY yang memiliki alat untuk donor plasma konvalesen.

Lilik menambahkan, di tengah tingginya permintaan ternyata juga diimbangi kesulitan mencari plasma konvalesen. Meski di DIY muncul gerakan bagi penyintas Covid-19 untuk medonorkan plasma konvalesen, namun pelayanannya juga masih terbatas.

“Sementara kami adakan satu alat dulu. Dalam sehari nantinya bisa melayani enam hingga delapan pendonor. Ketika alat sudah siap, kami akan sosialisasikan bagi penyintas Covid-19 untuk bisa mendonor ke PMI Kota Yogya,” urainya.

Teknis donor plasma konvalesen seperti kriteria donor darah biasa. Sebelumnya tetap ada skrining guna menjaga keamanan dan kualitas darah. Hal ini karena terapi plasma konvalesen acuannya ialah penyintas Covid-19 sudah membentuk antibodi. Sehingga hal itu yang diberikan kepada pasien untuk membantu melawan infeksi yang sedang dialami.

Sedangkan plasma konvalesen yang sudah berhasil diambil dari penyintas Covid-19, ketersediaannya akan dipublikasikan oleh PMI Kota Yogya. Selanjutnya, pasien yang membutuhkan akan dijembatani oleh rumah sakit. Hal ini karena pihak rumah sakit yang nantinya meminta ke PMI Kota Yogya dengan sistem *cost to cost*. **(Dhi)-f**

SIAP TERLIBAT AKTIF DALAM PEMBAHASAN
KNPI Kota Yogya Usulkan Raperda Pemuda



KR-Istimewa

Penyerahan naskah akademik raperda terkait kepemudaan dari KNPI kepada Ketua DPRD Kota Yogya.

YOGYA (KR) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Yogya mengusulkan dibentuknya rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pemuda. Hal itu merupakan hasil aspirasi dari masyarakat pemuda dari lintas organisasi yang ada di Kota Yogya.

Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Politik dan Hubungan Antarlembaga DPD KNPI Kota Yogya Pangky Febriantanto, mengaku regulasi di daerah menyangkut pembangunan kepemudaan didasarkan atas UU 12

draf naskah akademik setebal 118 halaman kepada Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko. Naskah akademik tersebut merupakan hasil pemikiran tim ahli internal.

Pangky mengaku, raperda mengenai pemuda bisa menjadi acuan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Yogya. Apalagi selama ini banyak organisasi kepemudaan di Kota Yogya yang kiprahnya cukup strategis. “Kami pun siap ikut terlibat aktif dalam proses pembahasan,” imbuhnya.

Selain menyerahkan draf naskah akademik, jajaran DPD KNPI Kota Yogya dalam audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Yogya juga menjajaki kemitraan program kerja. Terutama membangun sinergitas antarlembaga serta diskusi tentang peranan unsur pemuda dalam mengawal kebijakan publik.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, mengaku pihaknya siap mendukung berbagai program KNPI yang berimplikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Begitu pula terhadap usulan raperda terkait kepemudaan yang langsung ia teruskan ke pimpinan Komisi D sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangnya. **(Dhi)-f**

PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN AMDAL PENATAAN AREA PEDAGANG DAN PARKIR DI DUSUN KUJON DESA BOROBUDUR OLEH PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)	
Dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) mengumumkan Amdal rencana kegiatan penataan area pedagang dan parkir di Dusun Kujon Desa Borobudur sebagai berikut :	
1.	Pelaku Usaha : PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
2.	Alamat Pemrakarsa : Jln. Raya Yogya – Solo Km. 16 Prambanan, Sleman, Yogyakarta
3.	Jenis Rencana Kegiatan : Penataan Area Pedagang dan Parkir
4.	Skala/Besaran Rencana Kegiatan : Luas lahan: 10,7 Ha Luas bangunan: 48.031,85 m2
5.	Lokasi Rencana Kegiatan : Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
6.	Dampak potensial yang akan timbul : • Peningkatan getaran • Peningkatan kebisingan • Penurunan kualitas udara • Gangguan lalu lintas • Penurunan kualitas air permukaan • Gangguan terhadap kuantitas air tanah • Timbulan sampah dan limbah cair • Gangguan flora fauna • Konflik Sosial
Sehubungan dengan hal tersebut, mengharapakan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses selanjutnya. Saran, masukan dan tanggapan dapat disampaikan kepada:	
Pelaku Usaha PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) Jl. Raya Yogya – Solo KM. 16 Prambanan Sleman, Yogyakarta Telp/Fax: (0274) 496402-406 / (0274)496404 Email: sekretariat@borobudurpark.co.id	
Sekretariat Komisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Jl. Letnan Tukiyat No. 4A, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang Telp/Fax : (0293) 3301855 / (0293) 3301855	
Batas waktu penyampaian saran, masukan dan tanggapan: 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini dimuat (sampai tanggal 2 Februari 2021).	
Dikeluarkan di : Magelang Pada tanggal : 20 Januari 2021 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)	